

Jokowi: Tindak Pembakar Hutan, Jangan Memalukan di ASEAN Summit

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada penegak hukum dan pemangku jabatan terkait untuk menindak pembakar hutan. Jokowi tidak ingin persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sentimen negatif negara tetangga.

"Saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Saya kira Pak Kapolri tahulah apa yang harus dilakukan di sini karena pengalaman kemarin sudah melakukan itu. Penegakan hukum tegas kepada siapa pun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi/perusahaan, maupun masyarakat," ujar Jokowi dalam rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/2).

Jokowi ingin ada sanksi yang membuat efek jera pembakar hutan. Sanksi bisa berupa administrasi hingga pidana.

"Tapi ini semuanya ha-

rus tahu agar ada efek jera. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar lahan, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana," ujarnya.

Jokowi tidak ingin Indonesia menanggung malu di pertemuan negara-negara anggota ASEAN jika disinggung persoalan karhutla yang menimbulkan kabut asap lintas batas.

"Jangan sampai kita ini malu di ASEAN Summit, pertemuan negara-negara ASEAN, ada satu, dua, tiga negara yang membicarakan lagi mengenai ini. Dalam lima tahun ini sudah nggak ada," ujar Jokowi.

Jokowi menyampaikan bahwa sejak 2016 hingga saat ini belum ada lagi protes dari negara tetangga soal kabut asap.

"Jangan sampai dibuat ada lagi, saya titip itu. Malu kita. Dipikir kita nggak bisa selesaikan masalah ini, bisa. Tadi disampaikan Bapak Menko Polhukam, sudah turun 88 persen, kalau bisa ditingkatkan lagi dari angka itu," ujar Jokowi. ● mei

Anggota Ombudsman RI Terpilih Ucapkan Sumpah di Depan Jokowi

JAKARTA (IM) - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) masa jabatan 2021-2026 pagi ini resmi mengucap sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara. Para anggota Ombudsman ini dipilih setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Mereka diangkat melalui Keppres No.36/P/2021 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman RI Masa Jabatan Tahun 2021-2026. Pada Keppres tersebut, Ketua Ombudsman dijabat oleh Mokh Najih. Kemudian Wakil Ketua adalah Bobby Hamzar Rafinus.

Sementara Anggota Ombudsman antara lain Dadan Suparjo Suharmawijaya, Hery Susanto, Indriza Marzuki Rais, Jemly Hutabarat, Johannes Widjantoro, Robertus Na Endi Jaweng, dan Yeka Hendra Fatika.

"Bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun,"

demikian petikan sumpah yang dibacakan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman RI.

"Saya bersumpah/saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua merangkap anggota Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya bersumpah/saya berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian," lanjut bunyi sumpah jabatan.

"Saya bersumpah/saya berjanji akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya bersumpah/saya berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya," tutur para anggota Ombudsman.

Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Mensesneg Pratikno. ● mei

IDN/ANTARA



WISATA MAKAM RAJA SISINGAMANGARAJA XII
Wisatawan mengamati Makam Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII di Silalahi Pagar Batu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Senin (22/2). Makam pahlawan nasional tersebut sering dikunjungi wisatawan yang ingin berziarah.

Komisi I DPR Mau Berkunjung ke Qatar, Pengamat: Tak Urgen

JAKARTA (IM) - Rencana kunjungan kerja Komisi I DPR ke Qatar pada 28 Februari 2021 hingga 6 Maret menuai kritik. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karius menilai, tidak ada urgensi bagi DPR untuk melakukan kunjungan kerja di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Tak sedikit pun alasan yang membenarkan kunker yang dipertanyakan urgensinya itu dilakukan di tengah situasi krisis. Bagaimana bisa ada pejabat yang berpikir dan bertindak biasa-biasa saja seolah-olah kondisi kita normal-normal saja?" kata Lucius, Senin (22/2).

Ia mengingatkan, banyak masalah di dalam negeri yang perlu mendapat perhatian serius dari DPR. Ia menduga DPR sengaja memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk melakukan kunjungan kerja karena luput dari perhatian publik.

"Pemerintah dibiarkan bekerja pontang-panting, sementara DPR seolah-olah sibuk, tetapi parahnya kesibukan mereka bukan untuk membantu meringankan beban pandemi tetapi justru untuk menyenangkan diri

sendiri," katanya.

Lucius mempertanyakan alasan DPR untuk melakukan kunjungan kerja yaitu mengetahui kerja dua besar serta mengetahui perlindungan terhadap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di Qatar.

Menurut Lucius, alasan-alasan di atas hanya formalitas untuk mendapatkan izin dan legitimasi agar kunjungan Komisi I DPR dapat diterima di Qatar.

"Di dalam negeri ada banyak masalah, kok malah mau urus kerja dubes? Kok mau kontrol APBN dan kebijakan pemerintah mesti harus ke Qatar?" ujar Lucius.

Rencana kunjungan kerja Komisi I DPR diketahui menyusul beredarnya surat Nomor PW/0159/DPR/RI/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 itu ditujukan kepada Duta Besar LBBP RI untuk Qatar di Doha.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan adanya surat yang diteken oleh Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin itu. Namun, Indra mengatakan, surat tersebut masih bersifat peninjakan. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



MASA PENAHANAN EDHY PRABOWO DIPERPANJANG

Tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster Edhy Prabowo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan sesuai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/2). KPK memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu untuk 30 hari ke depan.

TNI AL Tangkap Kapal Cumi yang akan Selundupkan 28 TKI Ilegal ke Malaysia

ABK beserta puluhan TKI ilegal yang akan diselundupkan ke Malaysia sudah dibawa ke panton nelayan Bagan Asahan untuk pemeriksaan lanjutan.

JAKARTA (IM) - Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan, Lantamal I, Koarmada I, menggagalkan upaya penyelundupan puluhan orang Tenaga Kerja Ilegal (TKI) ke Malaysia, Minggu (21/2).

Kapal jenis Cumi yang mengangkut 28 TKI ilegal itu ditangkap di Perairan Tanjung Kumpul, Sumatera Utara.

Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai As-

han, Letkol Laut (P) Robinson Hendrik Etwory mengatakan, pada Minggu (21/2) pagi sekira pukul 05.30 WIB, Tim F1QR Lantamal I melakukan pengejaran terhadap satu kapal nelayan yang dituju untuk membawa TKI secara ilegal dari Tanjung Balai menuju Malaysia.

"Kapal jenis Cumi dengan bobot kurang lebih 7 GT (Gross Ton) yang diawaki oleh 1 orang nahkoda dan 4 orang

barang ilegal, bahkan narkoba yang saat ini disinyalir masih saja terjadi di Wilayah Kerja Koarmada I.

"Perairan Timur Sumatera di sepanjang Selat Malaka yang berbatasan dengan negara tetangga masih banyak digunakan sebagai pelintasan penyelundupan tenaga kerja ilegal, melalui pangkalan-pangkalan jajaran Koarmada I, TNI AL akan terus melakukan pengawasan

dan melaksanakan pemberantasan tindakan penyelundupan baik itu tenaga kerja ilegal, narkoba, penyelundupan komoditi dan tindakan ilegal lainnya yang

ABK beserta penumpangnya dibawa menuju panton nelayan Bagan Asahan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan tetap melakukan protokol kesehatan Covid-19. ● mei

Darmizal Sebut SBY yang Ambil Alih Partai Demokrat dari Pendirinya

JAKARTA (IM) - Persepsi antara pendiri dan pengurus DPP Partai Demokrat, terus memanas pasca konferensi pers kudeta yang dilontarkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Bahkan, kala itu AHY sempat mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta penjelasan soal keterlibatan lingkaran dalam istana atas kudeta tersebut.

Namun, pada Rabu 17 Februari 2021, AHY meluruskan ucapannya, jika dia mendapat informasi bahwa presiden Jokowi tidak tahu menahu soal kudeta di partai Demokrat.

Menanggapi hal itu, mantan Wakil Komisi Dewan Pengawas (Dewas) DPP sekaligus pendiri Partai Demokrat, HM Darmizal MS, merasa geram dengan ulah AHY yang tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. "Sebelumnya menuding, sekarang klarifikasi. Ketua umum yang masih sangat mentah dan grasak-grusuk dalam bertindak," ujar Darmizal kepada wartawan, Senin (22/2).

Pria kelahiran Sumatera Barat ini menyebut, jika Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY yang telah mengambil Partai Demokrat dari para pendirinya untuk dijadikan partai dinasti.

"SBY lah yang sesungguhnya telah melakukan kudeta atau pengambil alihan Partai Demokrat dengan segala cara. Pada saat KLB di Surabaya, SBY berjanji hanya untuk meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum sampai 2015. Pada Kongres Partai Demokrat tahun 2015 di Surabaya, SBY mengingkari janjinya dan muncul sebagai calon tunggal," tutur Darmizal.

Lebih lanjut Darmizal menjelaskan, pada Kongres ke 5 Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020, ditengah pandemi

Covid-19 dipaksakan Kongres dengan mewariskan jabatan Ketua umum dari sang bapak ke putra mahkotanya AHY. Saat itu tanpa memenuhi tata-cara ber-acara Kongres.

"Menyuruh ke luar ruang sidang semua peserta Kongres yang punya hak bicara, tidak mengesahkan keputusan sebagaimana mestinya, antara lain, jadwal acara, tata tertib, pembahasan AD/ART, pembahasan program kerja dan laporan pertanggungjawaban SBY Ketua umum sebelumnya. Namun langsung mendeklarasikan AHY menjadi Ketua umum oleh Ketua-ketua DPD. Itulah yang mereka sebut sebagai aklamasi," tegasnya.

Ditambahkan Darmizal, pada tahun 2003 setelah Partai Demokrat lolos verifikasi KPU, bergabunlah almarhumah ibu Ani Yudhoyono, sebagai Wakil Ketua umum partai Demokrat.

"Tak lama kemudian di tahun yang sama, SBY masuk menjadi calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrat, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Prof. Subir Budhisantoso," jelasnya.

Darmizal mengibaratkan, SBY saat itu seperti tetangga pemalu yang diajak masuk ke dalam rumah oleh pemiliknya. Sebelumnya tidak pernah berkunjung sampai pada Rapi-nas partai Demokrat di Wisma Kinasih tahun 2003. ● han

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pembubaran Perseroan Komanditer CV. GELEGAR INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Timur, sesuai dengan Akta nomor 04, tanggal 19 Februari 2021 dibuat dihadapan PUTRI AMARIA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, Kami menyatakan Perseroan Komanditer tersebut DIBUBARKAN, bagi pihak ketiga yang berkepentingan dengan Perseroan Komanditer harap menghubungi Direktur di Kantor Perseroan Komanditer CV. GELEGAR INDONESIA.

Jakarta, 23 Februari 2021
Ttd
Direktur

IDN/ANTARA



SIDANG LANJUTAN KASUS KEBAKARAN GEDUNG KEJAGUNG

Sejumlah terdakwa mengikuti sidang lanjutan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/2). Sidang lanjutan tersebut beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA	
Jalan Rawakuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta 13950 Telepon: (021) 4800725; Faksimili: (021) 4800712; Website: www.blajakarta.kemenag.go.id, E-mail: balitbangikt@kemenag.go.id	
RALAT PENGUMUMAN LELANG	
Menunjuk pengumuman lelang di koran International Media yang terbit tanggal 19 Februari 2021 Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta akan melakukan Lelang Penjualan Barang Milik Negara melalui internet (Closed Bidding) terhadap objek lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta, berupa:	
No	Objek Lelang
1	Tertulis Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Seharusnya 1 Unit Mobil Merk Type Toyota Kijang UF 81 No. Polisi B 2923 EQ Tahun 2004 Warna Hitam Metalik No. BPKB: C868592G atas nama P5 Agama DKI Jakarta
2	Tertulis Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Seharusnya 1 Unit Mobil Merk Type Isuzu NKR 55 No. Polisi B 7729 JQ Tahun 2007 Warna Hitam Kombinasi No. Mesin M019922 No. Rangka: MH1KEVA114K739235 No. BPKB: E8209604G atas nama Balai Litbang Agama Jakarta
3	Tertulis Sepeda Motor Seharusnya 1 Unit Sepeda Motor Merk Type Honda NF 100 D No. Polisi B 6398 JQ Tahun 2002 Warna Biru No. Mesin: KEVAE-1123254 No. Rangka: H1KEVA114K117449 No. BPKB: C3753769G atas nama Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan
4	Tertulis Sepeda Motor Seharusnya 1 Unit Sepeda Motor Merk Type Honda NF 100 D No. Polisi B 3185 JQ Tahun 2004 Warna Hitam Merah No. Mesin: KEVAE-1738334 No. Rangka: MH1KEVA114K739235 No. BPKB: C3912889G atas nama Balai Litbang Agama Jakarta
5	Tertulis Sepeda Motor Seharusnya 1 Unit Sepeda Motor Merk Type Honda NF 100 D No. Polisi B 3191 JQ Tahun 2004 Warna Hitam Merah No. Mesin: KEVAE-1738343 No. Rangka: MH1KEVA154K739240 No. BPKB: C9312888G atas nama Balai Litbang Agama Jakarta
Demikian Ralat disampaikan untuk diketahui.	
Jakarta, 23 Februari 2021 Kasubbag Tata Usaha,	